

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, tentang pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua fakta yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya. Pertama, pelanggaran prosedur disebabkan oleh PNS yang dengan sengaja melanggar prosedur perceraian bagi PNS, walaupun tidak memperoleh izin dari atasan tetapi tetap melakukan perceraian. Kedua, pelanggaran prosedur disebabkan oleh atasan yang mengabaikan hak bawahannya, yang telah mengikuti prosedur dan substansi perceraian yang berlaku.
2. Subtansi pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya yang meliputi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian PNS yang melanggar prosedur adalah untuk mempertahankan hukum materiil dan formilnya. Sedangkan surat izin yang diatur oleh PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 adalah peraturan tambahan yang bersifat administratif bagi PNS.
3. Dampak hukum pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak terlepas dari PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS meliputi: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya, peneliti menyarankan:

1. Kepada Pengadilan Agama dan Pejabat yang berwenang memberi dan menolak memberi izin agar dapat bersinergi agar Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dimaksimalkan pemberlakuannya.
2. Kepada pejabat pembina kepegawaian Kota Palangka Raya dalam hal ini adalah Walikota Palangka Raya agar melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai subjek hukum PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 ketika akan bercerai di Pengadilan Agama harus melalui prosedur yang telah diamanatkan peraturan tersebut. Dan harus disadari, ketika memilih untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil berarti juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alam, Nur dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2003: Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arifin, Miftahul *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aripin, Jaenal ,*Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Djatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984.

- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theori)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- M. Gaffar, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: T.t.
- Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Prasetyo Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sarwono, Jonathan, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, T.t.
- Tim Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaa, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. [Http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21563/node/543/pp-no-42-tahun2004-pembinaan-jiwa-korps-dan-kode-etik-pegawai-negeri-sipil](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21563/node/543/pp-no-42-tahun2004-pembinaan-jiwa-korps-dan-kode-etik-pegawai-negeri-sipil), diunduh pada tanggal, 04 Agustus 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. [Http://hukum.unsrat.ac.id/inst/bknse\\_1990\\_48.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/inst/bknse_1990_48.pdf), diunduh pada tanggal 04 April 2015 pukul 20.00 WIB.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, [Http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawasdoc/doc/sema.no\\_5\\_tahun\\_1984.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawasdoc/doc/sema.no_5_tahun_1984.pdf), diunduh pada tanggal 04 April 2015 pukul 20.00 WIB.

## **C. Internet**

Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Malang, 2011,

[Http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=07210060](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=07210060), diunduh pada tanggal 19 Nopember 2014 pukul 20.00 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/aparatur-sipil-negara-asn-wanita-dominasi-gugatan-perceraian-di-pengadilan-agama-palangka-raya/](http://pa-palangkaraya.go.id/aparatur-sipil-negara-asn-wanita-dominasi-gugatan-perceraian-di-pengadilan-agama-palangka-raya/), diunduh pada tanggal 21 September 2015 pukul 10.10 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni](http://pa-palangkaraya.go.id/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni), di-unduh pada tanggal 04 Maret 2015 pukul 20.00 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/](http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/), diunduh pada tanggal 04 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/](http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/) , diunduh pada tanggal 02 April 2015 pukul 19.00 WIB.

[Http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/pengertian-dan-definisi-dari-prosedur.html](http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/pengertian-dan-definisi-dari-prosedur.html), di-unduh pada tanggal 03 Maret 2015 pukul 20.00 WIB.

Shindu Arief Suhartono, *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kudus*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, [Http://eprint.undip.ac.id/id/eprint / 7977](http://eprint.undip.ac.id/id/eprint/7977), diunduh pada tanggal 02 April 2015 pukul 20.00 WIB.

Siti Nurul Midayanti, *Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010*, Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012, [Http://eprints.iainsalatiga.ac.id/470/](http://eprints.iainsalatiga.ac.id/470/), diunduh pada tanggal 02 April 2015 pukul 19.00 WIB.